

**EVALUASI PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN OLEH
DINAS PEKERJAAN UMUM
(Studi Kasus di Bagian Bina Marga Provinsi Bengkulu)**

Oleh :

**Vikry Dwi Kurniawan¹⁾, Mulyadi¹⁾, Heru Purnawan^{1)*}, Indah Prabawati²⁾,
Harmiati¹⁾**

¹⁾ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

²⁾ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Email Koresponden: shane.purnawan@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat program pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan menurut Sugiyono yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marha di Provinsi Bengkulu berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan program pemeliharaan jalan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peningkatan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan pihak terkait, seperti dinas terkait dan masyarakat, dalam hal pemeliharaan jalan

Kata Kunci: Dinas Pekerjaan Umum, Perbaikan Jalan, Evaluasi

Abstract

This study aims to examine how the road maintenance program is evaluated in the Department of Public Works, Spatial Planning, and Land Affairs, as well as the supporting and inhibiting factors of the road maintenance program in the Department of Public Works in Bengkulu Province. The research adopts a qualitative research method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation, following Sugiyono's approach. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of this study indicate that the evaluation of the road maintenance program in the Department of Public Works, particularly in the Bina Marha section, in Bengkulu Province, is relatively good. However, there are still some constraints such as limited budget and lack of human resources that affect the performance of the Department of Public Works in implementing the road maintenance program. One aspect that needs attention is the improvement of coordination between the Department of Public Works and relevant stakeholders, including related departments and the community, in terms of road maintenance.

Keywords: Department of Public Works, Road Repair, Evaluation

A. PENDAHULUAN

Pengawasan yang efektif dalam pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pengawasan melibatkan berbagai tahapan, seperti pengawasan pendahuluan, pengawasan saat pelaksanaan, dan pengawasan umpan balik (Bachri, 2022). Pengawasan pendahuluan melibatkan penetapan standar yang jelas untuk proyek yang akan dilaksanakan. Standar ini mencakup persyaratan teknis, kualitas bahan, waktu pelaksanaan, dan anggaran yang harus dipatuhi. Penetapan standar yang baik akan membantu memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Selama pelaksanaan proyek, pengawasan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan saat pelaksanaan mencakup pemantauan progres fisik proyek, pemenuhan persyaratan teknis, kualitas bahan, penggunaan anggaran yang tepat, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan (Purnawan, 2014). Jika ditemukan penyimpangan atau masalah, tindakan koreksi segera harus diambil untuk memperbaiki situasi dan memastikan kelanjutan proyek yang lancar. Pengawasan umpan balik dilakukan setelah proyek selesai atau pada tahap tertentu selama pelaksanaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil proyek dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat atau pihak

yang terlibat (Aprianty et al., 2022). Dengan mengumpulkan informasi tentang keberhasilan, kelemahan, dan tantangan yang dihadapi selama pembangunan, langkah-langkah perbaikan dan pembelajaran dapat diambil untuk proyek masa depan.

Pentingnya pengawasan yang baik dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk meminimalkan potensi penyimpangan dana, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek, serta mendeteksi masalah atau kebijakan yang tidak efektif secara dini (Purnawan, 2020). Pengawasan yang ketat juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum, fungsi pengawasan meliputi tugas seperti memastikan kualitas pelaksanaan proyek, memantau kepatuhan terhadap peraturan dan standar teknis, serta menangani penyimpangan atau masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat (Fauziyah & Arif, 2021).

Dalam kesimpulannya, pengawasan yang baik dalam pembangunan infrastruktur adalah aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui pengawasan yang efektif, pelaksanaan proyek dapat

dipantau dengan cermat, penyimpangan dapat diidentifikasi dan diperbaiki, dan manfaat maksimal dapat diperoleh bagi masyarakat (Adi, 2018). Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu menghadapi masalah dalam pelaksanaan fungsinya. Kondisi jalan penghubung antara kecamatan yang rusak parah diakibatkan perubahan iklim dan kurangnya perbaikan jalanan. Menurut laporan berita, kondisi jalan di Provinsi Bengkulu mencapai 40 persen. Dinas PU hanya fokus membangun jalan-jalan di daerah kota dan jalanan provinsi, sementara jalanan poros utama dan jalan penghubung daerah tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

Perbedaan antara jalan provinsi, kota, dan kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1) Jalan Provinsi adalah jalan utama yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, serta jalan strategis provinsi.
- 2) Jalan Kota adalah jalan dalam kota yang menghubungkan pusat pelayanan, persil, dan pusat permukiman di dalam kota.
- 3) Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam kabupaten yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, pusat kegiatan lokal, serta jalan dalam wilayah kabupaten.

Kondisi jalan alternatif di Provinsi Bengkulu, khususnya Jl. Poros Hibrida, sangat memprihatinkan. Jalan tersebut tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah meskipun menjadi jalur

penting yang menghubungkan berbagai tempat. Jalan tersebut banyak yang rusak dan dipenuhi batu, hanya sebagian kecil yang diaspal. Pada bagian yang berlubang, hanya ditimbuni pasir campur batu. Hal ini menyebabkan jalan menjadi licin saat hujan dan berdebu saat musim kemarau. Lubang-lubang juga tidak diperbaiki, sehingga sering terjadi kecelakaan.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) seharusnya segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak tersebut. Namun, kenyataannya masih banyak pembiaran terhadap jalan yang rusak. Hal ini menyebabkan kerugian dan kesulitan bagi pengguna jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan.

Dalam penelitian ini dibahas Tentang Evaluasi Menurut William N. Dunn (2013), istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan".

Menurut (Amanda, 2019) Evaluasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Secara umum, evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian yang sistematis tentang sejauh mana suatu program:

1. Input program digunakan untuk memaksimalkan output (efisiensi)
2. Hasil program mencapai tujuan

yang ditetapkan (efektifitas)

3. Tujuan program sesuai kebijakan dan kebutuhan masyarakat (kelayakan)

Menurut pendapat di atas, evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan (input) untuk memaksimalkan keluaran (output), evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau afektifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Memberikan informasi valid tentang kinerja kebijakan, program, dan kegiatan. Evaluasi mengungkapkan sejauh mana tujuan, nilai, dan kesempatan telah tercapai. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, sasaran, dan target tertentu.
2. Memberikan klarifikasi dan kritik. Evaluasi berkontribusi dalam memberikan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai-nilai tersebut menjadi lebih jelas melalui definisi dan implementasi tujuan dan target.
3. Mendukung aplikasi metode analisis kebijakan. Evaluasi memberikan informasi tentang kekurangan kinerja kebijakan, program, dan kegiatan, yang dapat berkontribusi dalam merumuskan kembali kebijakan, program, dan kegiatan tersebut. Evaluasi juga dapat memberikan rekomendasi untuk merumuskan alternatif kebijakan yang dapat menggantikan kebijakan yang ada.

Dengan evaluasi yang baik, pemerintah dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kinerja kebijakan dan programnya, serta melakukan perbaikan dan pengembangan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Dalam evaluasi kebijakan publik, terdapat Empat indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh (Dunn, 2003) sebagai berikut:

1. Efektivitas: Menilai ketepatan waktu dalam pencapaian hasil atau tujuan. Parameter yang digunakan adalah ketepatan waktu.
2. Efisiensi: Menilai pengorbanan yang minimal dalam mencapai hasil maksimal. Parameter yang digunakan adalah biaya, keuntungan, dan manfaat.
3. Responsiveness/Responsivitas: Menilai sejauh mana hasil rencana, kegiatan, atau kebijakan sesuai dengan preferensi atau keinginan kelompok sasaran.
4. Ketepatan/Appropriateness: Menilai apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna, bernilai, dan efisien bagi kelompok sasaran.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu proyek evaluasi yang berimplikasi signifikan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting yang memengaruhi hasil yang dicapai. Oleh karena itu, banyak pengetahuan tentang evaluasi publik berfokus pada praktik bisnis, karena implementasi merupakan faktor kritis yang perlu diperhatikan secara jelas (Purnawan, 2021).

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang diperlukan oleh pemerintah untuk menyediakan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan layanan serupa guna mendukung tujuan sosial dan ekonomi. Definisi lain mengatakan bahwa infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur guna memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Infrastruktur secara umum mencakup jalan, jembatan, sistem air dan pembuangan, bandara, pelabuhan, bangunan umum, serta fasilitas seperti sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi (Triyanto & Efendi, 2019). Beberapa contoh infrastruktur meliputi jalan raya, jembatan, jalur kereta api, sistem pembuangan limbah, penyediaan air bersih, jaringan telepon, dan lain sebagainya.

Penelitian ini juga membahas fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dalam perbaikan jalan, Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) adalah kewajiban dan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai atau anggota organisasi dalam sebuah instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja. Tugas pokok merupakan tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan, sedangkan fungsi merupakan kegunaan atau daya guna dari pekerjaan yang dilakukan.

Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1) Tugas pokok: Merupakan kewajiban dan tanggung jawab utama yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan 2) Fungsi: Merupakan kelompok aktivitas yang memiliki kesamaan dalam sifat, pelaksanaan, atau pertimbangan lainnya.

Penjelasan lebih rinci mengenai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dapat disusun dalam suatu pengaturan praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Koentjaraningrat, 2003). Menurut Creswell dalam (Purnawan et al., 2022) penelitian kualitatif berdasar pada paradigma interpretatif, yaitu fenomenologi yang mempelajari bagaimana kehidupan sosial, melihat tingkah laku manusia, apa yang dikatakan dan diperbuat, sebagai hasil dari bagaimana manusia mendefinisikan dunianya. Dengan metode ini penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini akan dilaksanakan dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengumpulan data. Dalam

rencana penelitian ini, yang akan menjadi instrumen adalah peneliti sendiri karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Setelah masalah di lapangan terlihat jelas, maka instrumen didukung dengan pedoman wawancara, alat-alat dokumentasi, serta alat tulis

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pada kondisi obyek yang alamiah sebagai perbedaan adalah eksperimen (Creswell, 2014), dimana peneliti merupakan instrument kunci dengan analisis data pengawasan terhadap infrastruktur Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna pada generalisasi

Tipe penelitian ini yang digunakan peneliti dalam dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Sugiyono, 2016). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat peneliti berada dilapangan atau kejadian yang terjadi dalam beberapa hari yang lalu/ sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah- masalah aktual sebagaimana adanya pada saat peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini Sumber Data Dibagi Menjadi Dua :

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dibutuhkan dalam penelitian yang bersumber dari responden dan informan serta

merupakan data utama melalui observasi dan penelitian kelokasi di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan melalui wawancara langsung pihak yang bersangkutan.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa literatur, karya ilmiah, makalah, opini, surat kabar, jurnal serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan langsung permasalahan penulis yang disusun atau dikaji secara relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan.

Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling. Purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang dilakukan oleh penulis atas dasar pertimbangan pribadinya

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Penentuan informannya menggunakan tehnik purposive (bertujuan), tehnik purposive adalah tehnik penentuan informan berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut didasarkan pada informan yang mengetahui secara jelas dan tepat informasi mengenai masalah dalam penelitian ini.

Menurut (Creswell, 2014), prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, meliputi empat jenis strategi yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, serta materi audio dan visual:

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya. Karena itu, observasi kemampuan seseorang

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan sasaran penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah ketika peneliti dapat melakukan face-to-face (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) memerlukan pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan

3) Dokumentasi

Dokumen ini bias berupa dokumen publik (misalnya makalah, laporan kantor) atau pun dokumen pribadi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan (Creswell, 2013).

Langkah dalam analisis data menurut (Creswell, 2018) pada penelitian studi kasus:

1. Mengumpulkan data, pengamatan, wawancara, dan dokumen
2. Mengorganisasikan data
3. Membaca dan membuat memo
4. Mendeskripsikan kasus dan konteksnya
5. Mengklarifikasikan data menjadi kode dan tema dengan menggunakan agregasi kategorikal
6. Menafsirkan data
7. Menyajikan dan memvisualisasikan data

Peneliti mengumpulkan data dengan cara pengamatan, wawancara dan studi dokumen, kemudian dilakukan pengorganisasian data menjadi sebuah kata-kata, kalimat atau cerita lengkap untuk dapat dianalisis. Selanjutnya, peneliti membaca seluruh teks beberapa kali dan mencoba memaknai hasil tersebut sebagai suatu kesatuan. Peneliti juga membuat catatan pinggir yang berupa frasa pendek, ide, atau konsep penting yang muncul dalam pikiran. Ketika sudah memeriksa semua catatan lapangan mulai dari pengamatan, transkrip wawancara dan studi dokumen peneliti membentuk kategori awal. Peneliti mencari bukti yang mendukung masing-masing kategori tersebut. Langkah berikutnya mendeskripsikan secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran menurut sudut pandang mereka dari perspektif yang ada dalam literatur.

Proses pengkodean (coding) dengan mengelompokkan data teks menjadi kategori informasi yang lebih kecil sehingga tidak semua informasi digunakan. Pada proses ini menggunakan agregasi kategorikal (mengelompokkan menjadi beberapa

kategori). Selanjutnya, peneliti akan berusaha mereduksi kategori tersebut menjadi tema yang akan digunakan di tahap akhir untuk menulis narasi peneliti. Kemudian, peneliti menggunakan penafsiran langsung dengan mengembangkan hasil tersebut. Pada fase terakhir, peneliti menyajikan gambaran mendalam tentang hasil menggunakan narasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan indikator penelitian yang peneliti gunakan yakni indikator Evaluasi. Adapun hasil penelitian berdasarkan indikator akan diuraikan sebagai berikut:

Perencanaan (Efektifitas)

Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis Kebutuhan: Melakukan evaluasi lalu lintas, kondisi jalan, dan prioritas pembangunan atau perbaikan jalan berdasarkan kebutuhan saat ini dan masa depan.
- 2) Kajian Teknis: Melakukan studi teknis untuk menentukan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan setempat, seperti jenis perkerasan, drainage, dan konstruksi yang tepat.
- 3) Pemantauan Kualitas Konstruksi: Memantau secara teratur kualitas konstruksi jalan untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dapat bertahan lama.
- 4) Pemeliharaan Jalan: Melakukan pemeliharaan rutin, termasuk

perbaikan kerusakan, pemotongan vegetasi, dan pembersihan drainase, untuk menjaga jalan tetap dalam kondisi baik.

- 5) Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Melakukan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembiayaan, perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi jalan guna mempercepat dan meningkatkan efektivitas pembangunan.

Dengan pendekatan yang efisien dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

Perencanaan (Efisiensi)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi perencanaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu, beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan Analisis Data: Melakukan penelitian yang komprehensif dan analisis data terkait kondisi jalan, kepadatan lalu lintas, kebutuhan transportasi, dan perkembangan demografi untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas.
2. Kolaborasi Stakeholder: Melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dalam proses perencanaan, termasuk pemerintah daerah, lembaga transportasi, ahli teknis,

masyarakat lokal, dan sektor swasta.

3. **Perencanaan Jangka Panjang:** Memprioritaskan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi untuk mengantisipasi pertumbuhan populasi dan kebutuhan transportasi yang akan datang.
4. **Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya:** Mengoptimalkan penggunaan anggaran, tenaga kerja, dan material dengan mengadopsi teknologi konstruksi yang efisien dan pemilihan metode konstruksi yang tepat.
5. **Evaluasi dan Pemantauan:** Melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja jalan yang dibangun untuk mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan.
6. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang perencanaan dan penggunaan anggaran, serta melakukan audit dan evaluasi untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.

Program kerja prioritas (Kecukupan)

Pada program kerja prioritas (Kecukupan) pembangunan jalan, fokus utamanya adalah memastikan kecukupan infrastruktur jalan yang memadai dan berkualitas. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilakukan dalam program ini meliputi pembangunan jalan baru, perbaikan jalan rusak, pemeliharaan rutin, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Tujuan dari

program ini adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Dalam pelaksanaannya, program ini memerlukan pendanaan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti anggaran pemerintah daerah, anggaran pemerintah pusat, pinjaman dari lembaga keuangan, dan potensi kerjasama dengan sektor swasta. Jumlah pendanaan yang dibutuhkan akan bervariasi tergantung pada lingkup dan skala proyek yang direncanakan, serta kondisi jalan yang ada.

Dengan melaksanakan program kerja prioritas pembangunan jalan, diharapkan dapat tercipta infrastruktur jalan yang memadai, berfungsi dengan baik, serta dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah terkait.

Program kerja prioritas (Kesamaan)

Program kerja prioritas (Persamaan) Pembangunan Jalan, fokus utamanya adalah mencapai kesamaan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Beberapa komponen yang dapat diperhatikan dalam program ini meliputi aksesibilitas universal, inklusi sosial, keadilan ruang, keselamatan jalan yang merata, dan partisipasi masyarakat.

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa jalan-jalan yang dibangun atau diperbaiki

memperhatikan aksesibilitas universal bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau mobilitas terbatas. Selain itu, program ini juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan dalam pembangunan jalan. Hal ini dapat mencakup kebutuhan transportasi masyarakat pedesaan, pengembangan jalan di daerah terpencil, atau memperhatikan kepentingan transportasi masyarakat adat atau minoritas.

Selanjutnya, program ini juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur jalan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memastikan keselamatan jalan yang merata di berbagai wilayah. Kesamaan juga diperjuangkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan jalan.

Pentingnya kesamaan dalam pembangunan jalan adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan yang dibangun atau diperbaiki tidak hanya memberikan manfaat bagi kelompok tertentu, tetapi juga mencakup kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat dengan cara yang adil dan inklusif. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menciptakan infrastruktur jalan yang merata, inklusif, dan memberikan manfaat bagi semua individu dan kelompok masyarakat.

Tujuan memiliki program kerja (Responsivitas)

Responsiveness dalam program kerja bertujuan untuk

memastikan bahwa program tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan yang terjadi seiring waktu. Program kerja yang responsif akan merespons perubahan lingkungan, tuntutan masyarakat, dan kebijakan yang berkaitan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam program kerja yang responsif meliputi identifikasi kebutuhan, mengikuti perkembangan, berfokus pada hasil, fleksibilitas dalam implementasi, dan kolaborasi dan partisipasi.

Pertama, program kerja yang responsif akan melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat atau sektor terkait. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode seperti survei, konsultasi, atau studi lapangan. Dengan memahami kebutuhan yang spesifik, program kerja dapat dirancang untuk memberikan solusi yang sesuai.

Kedua, program kerja yang responsif akan mengikuti perkembangan dan tren terkini di bidang terkait. Ini mencakup pemantauan kebijakan, teknologi, dan inovasi terbaru yang relevan. Dengan tetap keterkinian, program kerja dapat mengintegrasikan pendekatan terbaru dan menghadapi tantangan baru yang muncul.

Selanjutnya, program kerja yang responsif akan berfokus pada pencapaian hasil yang signifikan dan relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat atau sektor yang dilayani. Program kerja ini akan memantau dan mengevaluasi kemajuan secara teratur untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Selain itu, program kerja yang responsif akan memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan dan pengaturan. Hal ini memungkinkan penyesuaian strategi, kegiatan, atau alokasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan yang muncul atau perubahan kondisi. Fleksibilitas ini memungkinkan program kerja tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Terakhir, program kerja yang responsif akan mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan yang terlibat. Ini termasuk melibatkan masyarakat, sektor terkait, pemerintah, dan lembaga lainnya. Dengan melibatkan semua pihak yang relevan, program kerja dapat lebih baik dalam merespons kebutuhan dan harapan.

Tujuan memiliki program kerja (Ketepatan)

Tujuan Ketepatan dalam program kerja adalah:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat atau sektor terkait
- 2) Mengikuti perkembangan dan tren terkini di bidang terkait.
- 3) Berfokus pada pencapaian hasil yang signifikan dan relevan.
- 4) Fleksibilitas dalam implementasi dan pengaturan.
- 5) Mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.

Tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program kerja dapat beradaptasi dengan perubahan, memberikan manfaat yang signifikan, dan memenuhi kebutuhan yang spesifik dalam konteks yang terus berkembang.

Pembahasan

Perencanaan (Efektifitas)

Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga memiliki peran penting dalam perbaikan jalan di Provinsi Bengkulu. Keberhasilan dinas ini dapat dilihat dari sejauh mana mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dalam memperbaiki jalan yang rusak atau mengembangkan infrastruktur jalan baru. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas Dinas PU Bina Marga dalam perbaikan jalan di Provinsi Bengkulu antara lain:

1. Anggaran dan sumber daya: Dalam banyak kasus, Dinas PU Bina Marga membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan perbaikan jalan di Provinsi Bengkulu. Tanpa anggaran yang memadai, dinas tersebut mungkin akan kesulitan melakukan perbaikan jalan yang memadai dan tepat waktu.
2. Ketersediaan tenaga kerja dan peralatan: Dalam melakukan perbaikan jalan, Dinas PU Bina Marga membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan peralatan yang memadai. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan peralatan yang sesuai dapat membantu dinas ini menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien.
3. Sistem pengawasan dan pengendalian: Untuk memastikan efektivitas perbaikan jalan, Dinas PU Bina Marga harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian

yang baik. Dengan sistem ini, dinas tersebut dapat memastikan bahwa perbaikan jalan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tepat waktu.

4. Pemahaman mengenai kondisi jalan: Sebelum melakukan perbaikan jalan, Dinas PU Bina Marga harus memahami kondisi jalan yang akan diperbaiki dengan baik. Hal ini penting agar dinas tersebut dapat menentukan jenis perbaikan yang tepat dan menghindari kesalahan dalam melaksanakan perbaikan.

Efektivitas Dinas PU Bina Marga dalam perbaikan jalan di Provinsi Bengkulu dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya yang tersedia, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan peralatan yang memadai, memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang baik, serta memahami kondisi jalan yang akan diperbaiki dengan baik. Dengan demikian, diharapkan perbaikan jalan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Perencanaan (Efisiensi)

Dalam perbaikan jalan, Dinas PU Bina Marga di Provinsi Bengkulu dapat melakukan beberapa upaya perencanaan efisiensi, antara lain:

1. Menentukan prioritas perbaikan: Prioritas perbaikan jalan dapat ditentukan berdasarkan kondisi jalan, seperti tingkat kerusakan, tingkat kepadatan lalu lintas, dan urgensi perbaikan. Hal ini memungkinkan sumber daya

yang terbatas dapat dialokasikan dengan efektif.

2. Menentukan jenis perbaikan: Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi pada jalan, seperti retak, lubang, atau rusaknya permukaan jalan, Dinas PU Bina Marga dapat menentukan jenis perbaikan yang paling sesuai. Dengan demikian, upaya perbaikan dapat ditargetkan dengan efisien.
3. Menggunakan teknologi yang tepat: Dinas PU Bina Marga dapat memanfaatkan teknologi yang tepat guna meningkatkan produktivitas pekerjaan dan mempercepat waktu penyelesaian. Contohnya, penggunaan alat berat yang efisien dan ramah lingkungan dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan perbaikan jalan.
4. Koordinasi yang baik: Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait, seperti pengelola jalan, pemilik lahan, dan masyarakat sekitar, dapat memastikan perbaikan jalan dilakukan dengan tepat waktu dan efisien. Komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang baik akan meminimalkan hambatan dalam proses perbaikan.
5. Evaluasi dan pengukuran kinerja: Setelah pekerjaan selesai dilakukan, Dinas PU Bina Marga dapat melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan efisiensi yang dilakukan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki pada perencanaan efisiensi berikutnya.

Penggunaan data yang akurat dan terkini mengenai kondisi jalan, penggunaan sumber daya, dan waktu penyelesaian akan sangat membantu Dinas PU Bina Marga di Provinsi Bengkulu dalam membuat keputusan yang tepat dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya data yang valid, perencanaan perbaikan jalan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Program kerja prioritas (Kecukupan)

Program Kerja Prioritas (Kecukupan) adalah program yang dijalankan oleh Dinas PU Bina Marga di Provinsi Bengkulu untuk memperbaiki jalan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses jalan yang memadai, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam program ini meliputi identifikasi kebutuhan jalan, penentuan prioritas perbaikan, penetapan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi serta monitoring. Program ini efektif dalam meningkatkan kualitas jalan dengan memberikan prioritas pada perbaikan yang paling diperlukan. Selain itu, program ini juga membantu dalam penggunaan sumber daya yang efisien, meningkatkan kepuasan pengguna jalan, mengurangi potensi kecelakaan, dan meningkatkan mobilitas masyarakat.

Program kerja prioritas (Perataan)

Evaluasi Program Kerja Prioritas (Perataan) yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi

Bengkulu dalam perbaikan jalan memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan. Pertama, evaluasi dilakukan terhadap kualitas jalan dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah program dilaksanakan, seperti ketebalan lapisan aspal, kehalusan permukaan, dan tingkat keausan. Selanjutnya, aksesibilitas dievaluasi dengan mengukur waktu tempuh sebelum dan sesudah program untuk mengetahui efektivitas program dalam meningkatkan aksesibilitas. Selain itu, evaluasi efisiensi biaya dilakukan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai, guna memastikan program berjalan secara efisien. Terakhir, evaluasi kepuasan masyarakat dilakukan melalui survei untuk menilai dampak program terhadap kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Melalui evaluasi yang rutin, Dinas PU Bina Marga Provinsi Bengkulu dapat memastikan bahwa Program Kerja Prioritas (Perataan) dalam perbaikan jalan memberikan hasil optimal dan berkelanjutan. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memberikan manfaat besar bagi pembangunan wilayah tersebut.

Tujuan memiliki program kerja (Responsivitas)

Program kerja yang responsif adalah penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap perbaikan jalan. Dinas PU Bina Marga Provinsi Bengkulu harus merespons tuntutan masyarakat akan jalan yang baik dan aman. Program kerja harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat

setempat. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Program kerja yang responsif juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, karena fokus pada kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dengan memastikan responsivitas dalam program kerja, perbaikan jalan di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tujuan memiliki program kerja (Ketepatan)

Program kerja yang bertujuan untuk mencapai ketepatan dalam perbaikan jalan di Provinsi Bengkulu memiliki tujuan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perbaikan jalan. Evaluasi terhadap tujuan tersebut dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana program kerja mampu mencapai target ketepatan yang ditetapkan. Beberapa indikator evaluasi termasuk tingkat akurasi dalam penentuan kebutuhan, waktu pelaksanaan, dan anggaran perbaikan jalan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, diharapkan kualitas dan efisiensi perbaikan jalan di Provinsi Bengkulu dapat terus ditingkatkan.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil evaluasi program pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa

program tersebut telah menjaga kondisi jalan dengan baik, tetapi masih ada kendala seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Diperlukan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait serta upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaan anggaran. Disarankan untuk terus melakukan evaluasi berkala dan memperkuat koordinasi serta kapasitas sumber daya manusia dalam program pemeliharaan jalan.

Saran

Dinas Pekerjaan Umum perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi kinerja, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan meningkatkan pelatihan tenaga kerja dalam program pemeliharaan jalan. Masyarakat diharapkan turut mengawasi dan melaporkan jalan rusak yang mengganggu aktivitas pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan sosial: pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan* (3rd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Amanda, P. I. (2019). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Aprianty, H., Marianto, D., Sutardi, D., RahimanDani, & Purnawan, H. (2022). Analysis Of Policy Implementation Of The Service Of Youth And Sports In An Effort To Increasing Athletes Achievement In Bengkulu Province. *Journal of Social Science and Humanities*, 1(2).

- <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JoSSH/article/view/122%0Ahttps://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JoSSH/article/download/122/106>
- Bachri, S. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 192–216.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Second Edi). University of Nebraska.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In *Gadjah Mada University Press*. Gadjah Mada University Press. <https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Koentjaraningrat. (2003). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Gramedia.
- Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R & D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. (p. 118).
- Triyanto, D., & Efendi, S. (2019). Analisis Penerapan Elektronik Kesehatan (E-Kes) di Puskesmas Rawat Inap Kota Bengkulu. *Jurnal Administrasi Publik : Public Admnistration Journal*, 9(2), 158–165. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2901>